

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LASINRANG KABUPATEN PINRANG

**DEA GHEBY YOLANDA D.
A031191145**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LASINRANG KABUPATEN PINRANG

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DEA GHEBY YOLANDA D.
A031191145**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LASINRANG KABUPATEN PINRANG

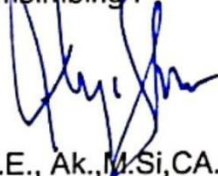
disusun dan diajukan oleh

DEA GHEBY YOLANDA D.
A031191145

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

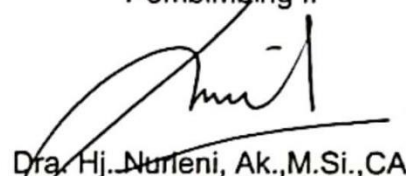
Makassar, 30 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin, S.E., Ak.,M.Si,CA.,CRA.,CRP.
NIP 19670414 199412 1 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak.,M.Si.,CA.
NIP 19590818 198702 2 0021



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LASINRANG KABUPATEN PINRANG

disusun dan diajukan oleh

**DEA GHEBY YOLANDA D.
A031191145**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 9 Maret 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak, M.Si., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2. Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3. Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4. Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syamsuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dea Gheby Yolanda D.
NIM : A031191145
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
LASINRANG KABUPATEN PINRANG**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



DEA GHEBY YOLANDA D.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Analisis Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap Kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lasinrang Kabupaten Pinrang". Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tentunya memiliki banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, tetapi akhirnya dapat dilewati berkat banyaknya bantuan dan dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

Pertama-tama penulis sangat berterimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.

Yang paling berjasa dalam hidup penulis, orang tua tercinta penulis, Ibu Debby Ekawati dan Bapak Darwis Akkas, S.Si yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik dari segi materiil dan non materiil serta terimakasih telah selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis dan tak lupa adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi, Glen dan Ghefin yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kelancaran pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya kepada Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak, M.Si., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP dan Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA selaku dosen penguji yang telah memeberikan saran-saran demi kelancaran penulisan skripsi ini serta Bapak Muhammad Ashari, M.Sa., Ak selaku dosen penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam urusan akademik.

Tak lupa kepada Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama

masa studi serta seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Ical dan Pak Richard atas segala bantuannya dalam proses kelengkapan administrasi dan akademik.

Sahabat-sahabat seperjuangan dikampus, Fidyawati Djapri, Khaerani Makbul, Yunike Arista Kusumawardani, Nur Saidah Kamilah, Alifah Annisa, Andi Qien Qien Qabila dan Ainun Khaeriyah Nur Iva, Terimakasih atas segala bantuan, semangat, doa dan motivasi selama berkuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat penulis yang ada di Kendari yaitu Pande Sinta Wulandari, S.Ak, Evi Elfida, S.Pd, Andi Firda Niswatul Aqidah, S.Ked, Retno Pricilya Karwati Putri, Alfiyyah Putri Utami, Terimakasih karena selalu menyemangati penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

Kepada Semua pihak di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang terkhusus di bagian asset dan keuangan yang telah membantu dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu yang selalu membantu penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

ABSTRAK

Analisis Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap Kemandirian BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lasinrang Kabupaten Pinrang

Analysis of Regional Public Service Agency (BLUD) Revenue on The Independence of The Local Public Hospital Lasinrang Pinrang District

Dea Gheby Yolanda D.
Syamsuddin
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio keuangan, tingkat pendapatan BLUD serta kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sebagai BLUD. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan rumus rasio keuangan, rasio pendapatan BLUD terhadap biaya operasional dan rumus tingkat kemandirian BLUD. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif deskriptif yang berlokasi di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian ini tingkat kinerja rasio keuangan pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019 masuk dalam kategori SEDANG dengan hasil terbaik ada pada tahun 2018. Untuk rasio pendapatan BLUD terhadap biaya operasional memperoleh hasil yang berfluktuasi dengan hasil terbaik ada pada tahun 2018 dan terendah ditahun 2019 namun rasio pendapatannya sudah memenuhi standar walaupun cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori Partisipatif yang berarti ketergantungannya terhadap pemerintah pusat semakin sedikit namun belum dapat dikatakan mandiri sepenuhnya.

Kata Kunci: BLUD, Kemandirian, Rasio Keuangan, Rumah Sakit

This study aims to determine the level of financial ratios, the income level of the BLUD and the independence of the Lasinrang Hospital in Pinrang Regency as a BLUD. The analytical tool in this study uses the formula for financial ratios, the ratio of BLUD income to operational costs and the formula for the level of independence of BLUD. This research is a descriptive quantitative research which is located at Lasinrang Hospital, Pinrang Regency. The results of this study show that the performance level of financial ratios at Lasinrang Hospital in Pinrang Regency in 2017-2019 is in the MODERATE category with the best results in 2018. For the ratio of BLUD income to operational costs to obtain fluctuating results with the best results in in 2018 and the lowest in 2019 but the income ratio met the standard even though it tended to decrease. The level of independence of the Lasinrang Hospital in Pinrang Regency is included in the Participatory category, which means that it is less dependent on the central government but cannot be said to be fully independent.

Keyword: *BLUD, Independence, Financial Ratios, Hospital*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 <i>Resource-Based View Theory</i>	11
2.1.2 Teori <i>Peacock Wiseman</i>	12
2.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	13
2.1.4 Tujuan & Asas BLUD	14
2.1.5 Karakteristik BLUD	15
2.1.6 Pendapatan BLUD	16
2.1.7 Belanja BLUD.....	20
2.1.8 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD	22
2.1.9 Kemandirian	24

2.2 Tinjauan Empirik	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Variabel Penelitian.....	28
3.6 Analisis Data.....	28
3.6.1 Rasio Keuangan.....	28
3.6.2 Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional	36
3.6.3 Tingkat Kemandirian BLUD	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Layanan dan Fasilitas Tempat Tidur yang ada di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang.....	42
4.1.2 Visi dan Misi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang	44
4.1.3 Struktur Organisasi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang	45
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
4.2.1 Kinerja Keuangan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2019	47
4.2.2 Penilaian Kinerja Keuangan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2019	64
4.2.3 Kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2019	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
5.3 Keterbatasan Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Skor Rasio Kas	29
Tabel 3.2 Skor Rasio Lancar	31
Tabel 3.3 Skor Periode Penagihan Piutang.....	32
Tabel 3.4 Skor Perputaran Aset Tetap.....	33
Tabel 3.5 Skor ROFA	34
Tabel 3.6 Skor ROE	35
Tabel 3.7 Skor Pendapatan BLU terhadap Belanja Operasional	37
Tabel 3.8 Kriteria Tingkat Kemandirian BLUD	38
Tabel 4.1 Data Sumber Daya Manusia RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang	41
Tabel 4.2 Skor Rasio Kas.....	48
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Skor Rasio Keuangan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	48
Tabel 4.4 Skor Rasio Lancar	50
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Skor Rasio Lancar RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	51
Tabel 4.6 Skor Periode Penagihan Piutang	53
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Skor Peiode Penagihan Piutang RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	53
Tabel 4.8 Skor Perputaran Aset Tetap	55
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Skor Perputaran Aset Tetap RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	55
Tabel 4.10 Skor ROFA	57
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Skor Imbalan atas Aset Tetap RSUD	

Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	58
Tabel 4.12 Skor ROE	60
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Skor Imbalan Ekuitas RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019.....	60
Tabel 4.14 Skor Pendapatan BLU terhadap Belanja Operasional	62
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Skor Rasio Pendapatan BLUD Terhadap Biaya Operasional RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	63
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan dan Total Skor RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang 2017-2019	64
Tabel 4.17 Kriteria Tingkat Kemandirian BLUD	69
Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Penetapan Rasio Kemandirian BLUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Total Skor dan Skor Kinerja Keuangan RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2019	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Penulis	79
Lampiran 2. Peta Teori.....	80
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 4. Struktur Organisasi RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang	84
Lampiran 5. Neraca & Laporan Realisasi Anggaran RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2019	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gagasan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengendalikan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan penduduknya dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia. Mengurangi ketergantungan daerah pada pusat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu syarat reformasi otonomi daerah. Ini akan meningkatkan stabilitas politik dan kohesi nasional. Setiap daerah di Indonesia memiliki hak atas otonomi daerah, yang memungkinkan setiap daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan persyaratannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang Pemerintah Daerah.

Pengembangan identitas lokal telah difasilitasi oleh adopsi otonomi daerah. Pemerintah daerah merespons dengan baik terhadap berkurangnya kekuasaan dan kontrol pusat dalam hal menyelesaikan masalah yang unik di wilayah mereka. Bahkan uang yang diterima lebih dari apa yang dikumpulkan dari pemerintah pusat melalui cara formal. Dengan bantuan dana tersebut, pemerintah daerah dapat mendukung pertumbuhan daerah dan melaksanakan inisiatif untuk mempromosikan budaya dan pariwisata. Selain itu, inisiatif pemerintah daerah akan lebih efisien karena lebih fokus dan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk diterapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menjadi landasan reformasi keuangan negara dan mendukung otonomi daerah, telah mengamanatkan

peralihan sistem penganggaran dari sistem konvensional ke penganggaran berbasis kinerja sejak tahun 2003. Sepanjang jalan, Badan Layanan Publik Regional (BLUD), sebuah sistem yang diberlakukan oleh unit implementasi teknis kantor regional untuk melayani klien dengan pola manajemen keuangan yang dapat disesuaikan, mulai terbentuk. Di mana sistem ini menawarkan kebebasan untuk menerapkan praktik perusahaan yang sehat untuk meningkatkan layanan masyarakat. Perubahan ini sangat penting mengingat kebutuhan layanan publik memerlukan dana yang tinggi sedangkan disisi lain sumber daya pemerintah terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah berusaha mewirausahakan instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan (*enterprising the government*) sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan oleh pemerintah.

Instansi pemerintah yang tugas dan tanggung jawab utamanya adalah menawarkan layanan kepada publik dapat menggunakan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menekankan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kas Negara, khususnya pasal 68 dan 69. Organisasi-organisasi ini umumnya disebut sebagai Badan Layanan Publik (BLU). Diantisipasi bahwa instansi pemerintahan dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik setelah menjadi BLU. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005, yang mengatur pengelolaan keuangan di Badan Pelayanan Publik, dirilis pada tahun 2005. (BLU). Di bidang keuangan, aturan ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi badan pemerintah yang lebih mandiri.

Salah satu jenis BLU yang memimpin pertumbuhan Kesehatan Masyarakat adalah rumah sakit. Namun, banyak kekhawatiran telah dibuat tentang kualitas layanan rumah sakit yang berkelanjutan. Ini terutama rumah sakit lokal atau rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah. Akar penyebabnya adalah yang terkenal: kurangnya dana rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, yang mencegah mereka meningkatkan kualitas layanan mereka karena kurangnya peralatan medis dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang lemah. Rumah sakit diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan biaya layanan tersebut merupakan faktor utama dalam evolusi manajemen rumah sakit, baik dari perspektif manajerial maupun operasional.

Adanya perubahan menjadi Badan Layanan Umum ini diharapkan mampu mendorong dan menjadi peluang bagi rumah sakit untuk menjadi mandiri. Dalam hal ini rumah sakit dapat bertindak lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat untuk lebih cepat dalam segi pelayanan maupun dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien namun tidak melupakan jati dirinya dalam mengemban misi sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan publik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang berbanding lurus dengan kinerja keuangan rumah sakit.

Kemandirian dari suatu Badan Layanan Umum Daerah menjadi sangat penting karena dari tingkat kemandirian inilah dapat dilihat sejauh mana instansi mampu mengumpulkan atau menghasilkan pendapatannya sendiri dan seberapa mampu ia membiaya belanja operasionalnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kualitas keuangan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan maka dari tingkat kemandirian ini pula dapat

dilihat bagaimana tingkat kualitas pelayanannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah rumah sakit dimana rumah sakit akan terus melakukan peningkatan pelayanannya dengan mengoptimalkan pendapatan BLUD nya, dengan sumber pendapatan yang besar maka pengeluaran akan semakin banyak, dengan semakin banyaknya pengeluaran maka akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kemandirian keuangannya akan semakin membaik.

Pengendalian biaya merupakan masalah yang menantang karena dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kekuatan pasar, faktor ekonomi, profesionalisme dalam sumber daya manusia, dan kemajuan teknis rumah sakit. Dampak tumbuhnya tuntutan tersebut tidak lepas dari rumah sakit pemerintah yang berada di tingkat pusat dan daerah. Rumah sakit pemerintah biasanya melayani kelas menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani kelas menengah ke atas, jika dilihat dari perspektif kelompok masyarakat.

Rumah sakit harus secara independen mengatasi masalah ini karena biaya perawatan kesehatan cenderung meningkat seiring waktu. Karena rumah sakit pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada kelas menengah ke bawah, kenaikan biaya kesehatan memiliki efek uniknya sendiri pada mereka. Oleh karena itu, rumah sakit pemerintah diharapkan memiliki fasilitas yang terjangkau dan berkualitas tinggi.

Secara umum, implementasi Badan Layanan Publik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Kabupaten tidak dapat memisahkan penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi dari pelaksanaan rumah sakit sebagai badan pelayanan publik daerah. sehingga pada akhirnya rumah sakit akan mampu mengelola urusannya sendiri secara mandiri. Dia memandang kemandirian finansial sebagai tanda

kemandirian rumah sakit dari organisasi layanan publik setempat. jika semua biaya operasional yang timbul telah ditanggung oleh pendapatan.

Studi oleh Slamet & Supeno (2022) yang melihat independensi BLUD di rumah sakit menemukan bahwa sementara objek yang diteliti kinerja keuangan tidak memenuhi harapan, tingkat independensinya memenuhi harapan tersebut, memungkinkannya untuk diklasifikasikan sebagai mampu membiayai kegiatan operasionalnya.

Kemandirian rumah sakit justru meningkat selama pandemi, menurut penelitian Ariyani, A. (2021), yang juga dipengaruhi oleh jenis rumah sakit, fasilitas, dan infrastruktur, serta ketersediaan sumber daya manusia.

Menurut Son, A. A. (2020), yang melakukan studi terkait, rumah sakit kota Bekasi mungkin sudah dianggap mandiri. Ini menyiratkan bahwa kemandirian rumah sakit sebagai BLUD telah tercapai, dan kemandirian finansialnya juga terus meningkat. Puspitawati & Ratnawati (2014) juga melakukan studi yang sebanding di Blud Rs Jiwa Menu. Meskipun kemerdekaannya secara umum meningkat, pemerintah terus mensubsidi gaji pejabat sipil. Kinerja keuangan RSUD Bendan Kota Pekalongan kemudian diteliti dalam studi oleh Wijayanti & Masdjojo (2017), dengan temuan bahwa kinerja keuangan BLUD-nya dikategorikan dalam kategori menengah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian serupa dengan mengkaji bagaimana tingkat kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang dalam menggunakan pendapatan BLUD nya. Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis data rasio kemandirian lalu menggunakan tabel indikator tingkat kemandirian untuk melihat apakah RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sudah dalam kategori mandiri atau belum.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016 RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang memiliki tingkat kemandirian sebesar 62,7% yang artinya RSUD ini tergolong dalam kategori Partisipatif. Yang artinya RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sebagai Badan Layanan Umum Daerah sedikit demi sedikit mulai mengurangi ketergantungannya terhadap pendapatan dari APBD namun masih tetap membutuhkan atau tergantung pada APBD dimana belanja operasional pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang masih memerlukan bantuan dari pendapatan APBD walaupun sudah memiliki pendapatan BLUD sendiri namun pendapatan BLUD yang dimiliki belum mampu menutupi seluruh belanja operasionalnya. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk menjadikan RSUD Lasinrang Kabupaten pinrang sebagai objek dari penelitian ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian serupa dengan mengkaji bagaimana tingkat kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang dalam menggunakan pendapatan BLUD nya. Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis data rasio kemandirian lalu menggunakan tabel indikator tingkat kemandirian untuk melihat apakah RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sudah dalam kategori mandiri atau belum.

Untuk hal yang membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah objek dari penelitiannya. Peneliti memilih RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang sebagai objek karena peneliti meyakini bahwa objek inilah yang paling sesuai dengan kriteria penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada analisis datanya, dimana sama-sama menggunakan rumus rasio kemandirian.

Sedangkan hal baru dari penelitian ini juga terletak objek, dimana belum ada penelitian serupa yang melakukan kajian terhadap tingkat kemandirian RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang terhadap penggunaan pendapatan BLUD nya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian di objek tersebut. Maka dari itu judul penelitian yang peneliti ajukan yaitu “ANALISIS PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KEMANDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LASINRANG KABUPATEN PINRANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini maka, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah tingkat rasio keuangan BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019?
2. Bagaimanakah tingkat pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional (*Cost Recovery Rate*) RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019?
3. Bagaimanakah tingkat kemandirian BLUD RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat rasio keuangan BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019.
2. Menganalisis tingkat pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional (*Cost Recovery Rate*) RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019.

3. Menganalisis tingkat kemandirian penggunaan pendapatan BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dan memperluas pemahaman pembaca dan peneliti tentang tingkat kemandirian rumah sakit LASINRANG dalam memanfaatkan uang BLUD. Temuan penelitian ini juga harus berfungsi sebagai referensi tambahan, menawarkan pengetahuan, dan berfungsi sebagai bahan studi penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa digunakan oleh rumah sakit sebagai masukan guna mengetahui kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada dalam proses pengelolaan dan penggunaan pendapatan BLUD nya dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi objek dalam hal ini RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang dalam pengambilan keputusan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Pemerintah daerah dapat menggunakan laporan ini sebagai informasi latar belakang dan panduan ketika merumuskan kebijakan dan memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja keuangan, terutama dalam hal pendapatan BLUD

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup pendapatan BLUD RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi, dimana pada bab ini pembaca akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan untuk apa serta mengapa penelitian tersebut dilakukan dan kepada siapa penelitian ditujukan. Maka pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat mengenai pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Disini peneliti wajib menyajikan teori-teori dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti selain itu peneliti juga dapat memasukkan tinjauan empiric yang menjadi dasar atau acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup rancangan penelitian, tempat serta waktu, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta definisi operasional, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari pengujian atau peneltiian yang dilakukan. Jika memungkinkan dapat ditambahkan pembahasan atas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir dari skripsi ini memuat tiga hal pokok, yaitu kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Resource-Based View Theory*

Menurut metode RBV, korporasi adalah kumpulan sumber daya strategis dan produktif yang dapat digunakan untuk mendukung strategi kompetitifnya dan tidak biasa, rumit, saling melengkapi, dan sulit ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif perusahaan harus didasarkan pada aset tertentu yang menggagalkan upaya imitasi dan tantangan yang ditimbulkan oleh barang dan jasa yang bersaing. Keunggulan kompetitif perusahaan dapat dilemahkan dengan meningkatnya persaingan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan keahlian khas untuk berkembang dalam menghadapi tekanan kompetitif yang semakin intens (Joseph t Mahoney, 1992).

RBV ini berpendapat bahwa mempertahankan keunggulan kompetitif tergantung pada memiliki akses ke sumber daya kunci tertentu, atau sumber daya dengan kualitas seperti nilai dan hambatan untuk duplikasi. Jika bisnis secara efisien mengoptimalkan sumber daya ini, keunggulan akan dihasilkan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, RBV menempatkan penekanan kuat pada pengambilan keputusan strategis, mengoptimalkan sumber daya manusia, dan mengelola, mengidentifikasi, mengembangkan, dan menggunakan sumber daya.

Faktor sumber daya memiliki dampak signifikan pada apakah suatu organisasi berhasil atau gagal. Kekuatan perusahaan yang didukung dengan baik oleh sumber daya berkualitas dalam kerangka sistem manajemen sumber daya yang selaras secara strategis, terintegrasi, terhubung, dan bersatu inilah yang dikenal sebagai keunggulan kompetitifnya. Keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh persaingan. Persaingan menuntut agar operasi perusahaan, inovasi semacam itu dan budaya tempat kerja yang positif, akurat. Menurut berbagai pendapat ahli, teori pandangan berbasis sumber daya mengacu pada kekayaan organisasi, baik fisik maupun non-fisik, dan berpendapat bahwa untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sumber daya harus memiliki nilai tambah ekonomi dan memiliki kualitas yang menantang untuk ditiru dan sulit untuk diganti.

2.1.2 Teori *Peacock Wiseman*

Pemeriksaan pengeluaran pemerintah yang diterima menjadi dasar argumen Peacock dan Wiseman. Menurut penelitian ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran dengan bergantung pada kenaikan pengumpulan pajak. Pertumbuhan pendapatan pajak menghasilkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang benar adalah bahwa orang tidak suka membayar tarif pajak yang tinggi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang terus meningkat. Dalam keadaan normal, kenaikan GNP menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk pemerintah serta pengeluaran yang lebih tinggi.

Argumen Peacock dan Wiseman didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki ambang batas untuk intoleransi pajak, atau titik di mana ia dapat memahami tingkat perpajakan yang diperlukan pemerintah untuk mendanai pengeluarannya. Namun, tingkat toleransi ini menyulitkan pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak sesuka hati. Menurut ide Peacock dan

Wiseman, antara lain, tiga dampak atau gangguan menyebabkan pajak naik di atas level awalnya.

1. Efek penggantian, juga dikenal sebagai efek perpindahan, adalah disfungsi sosial yang mengakibatkan pengalihan kegiatan pribadi ke kegiatan resmi.
2. Efek inspeksi (inspection effect) adalah inisiatif pemerintah baru yang muncul setelah krisis keuangan.
3. Efek konsentrasi adalah penyakit sosial yang menyebabkan konsentrasi aktivitas pribadi sebelumnya di bawah kendali pemerintah.

Pemerintah harus meminjam uang dari luar negeri karena pajak saja tidak akan cukup untuk meringankan tiga konsekuensi atau gangguan ini. Mengikuti efek lotus atau gangguan, ada kewajiban untuk membayar hutang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah meningkat karena komitmen tambahan serta peningkatan GNP. Adanya ketiga konsekuensi ini meningkatkan aktivitas pemerintah, mencegah tarif pajak turun kembali ke tingkat turbulensi sebelum ekonomi bahkan setelah gangguan dikurangi.

2.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Pelayanan Publik Daerah (BLUD) adalah satuan kerja daerah atau Satuan kerja di satuan kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjual barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan dan dengan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip produktivitas dan efisiensi.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kas Negara mengacu pada pengelolaan BLU sebagai komponen kas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Nomor 1, Kas Negara bertanggung jawab untuk mengelola dan meminta pertanggungjawaban negara

atas sumber daya keuangannya, termasuk investasi dan kekayaan terpisah, sebagaimana diatur dalam APBN dan APBD. Selain itu, Kas negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi organisasi di bawah Pelayanan Publik. Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengatur pembentukan BLU. Menurut PP nomor 12 tahun 2019 dalam Pasal 205, pemerintah daerah dapat membuat BLUD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen keuangan di BLUD fleksibel, mencakup pembiayaan, manajemen pengeluaran, dan manajemen pendapatan. Salah satu hasil dari reformasi keuangan adalah organisasi pelayanan publik (BLU). Reformasi keuangan berpengaruh pada layanan masyarakat yang disediakan oleh BLU / BLU. Salah satunya berkaitan dengan manajemen keuangan BLU/BLUD, yang saat ini menempatkan prioritas lebih tinggi pada kemandirian, efisiensi, dan produktivitas layanan masyarakat daripada mencari keuntungan.

2.1.4 Tujuan & Asas BLUD

Dengan menawarkan fleksibilitas dalam manajemen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penggunaan praktik bisnis yang sangat baik, BLU berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan umum dan kehidupan intelektual negara.

Prinsip BLU ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 tentang administrasi keuangan Badan Pelayanan Publik

1. BLUD bermaksud untuk menawarkan layanan publik kepada anggota masyarakat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh lembaga induk terkait.
2. BLUD adalah alat yang digunakan oleh kementerian negara, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka; akibatnya, tidak memiliki posisi hukum yang berbeda dari entitas tersebut.
3. Dalam hal manfaat layanan yang dihasilkan, menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan walikota bertugas melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD untuk penyampaian layanan publik.
4. Orang yang dipilih untuk mengawasi BLUD bertugas melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik yang telah ditugaskan kepadanya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, atau Walikota.
5. BLUD memprioritaskan upayanya daripada menghasilkan keuntungan.
6. Kementerian negara, lembaga, SKPD, dan pemerintah daerah memproduksi dan menyampaikan rencana kerja, anggaran, laporan keuangan, dan BLUD sebagai bagian dari rencana kerja, anggaran, dan laporan keuangan mereka.
7. BLUD menangani penyediaan layanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang etis.

2.1.5 Karakteristik BLUD

Kualitas BLUD berikut membedakannya dari unit kerja lain:

1. BLUD adalah unit kerja yang menawarkan produk dan layanan langsung kepada masyarakat.

2. BLUD mengikuti prinsip-prinsip bisnis yang etis tanpa mengutamakan keuntungan finansial. Ini menunjukkan bahwa semua pendapatan BLUD digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan layanan.
3. BIRU dioperasikan di bawah prinsip produktivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran bukanlah tujuan karena kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan dengan lebih baik pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas layanan.
4. Operasi BLUD dinamis, baik dari segi keuangan maupun manajemen sumber daya manusia. Keuntungan dan surplus BLUD tidak harus disimpan kembali di kas lokal.
5. BLUD tidak termasuk dalam terminologi yang diakui secara umum.

2.1.6 Pendapatan BLUD

Menurut Kartikahadi, dkk. (2012: 186), Pendapatan B adalah pendapatan atau kenaikan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi yang tidak berasal dari kontribusi investor, seperti pendapatan, pertumbuhan aset, atau pengurangan kewajiban.

BLUD diizinkan untuk menggunakan semua penghasilan mereka untuk membayar biaya BLUD. Ini adalah topik penting tentang fleksibilitas untuk mempromosikan layanan masyarakat yang lebih baik dan lebih efektif. Aturan berikut mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan BLUD:

1. Setiap alat BLUD tunggal dapat digunakan diam-diam untuk memodifikasi sangkutan BLUD belanja.
2. Pendapatan BLUD terdiri dari pembayaran yang dilakukan sebagai hasil dari kegiatan BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanannya dalam menanggapi permintaan.

Meskipun imbalan dari layanan yang diberikan adalah sumber utama pendapatan BLUD, sumber uang lain juga ada. Ketentuan menyatakan bahwa pendapatan BLUD berasal dari:

1. Penghargaan Vang diperoleh untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan.
2. Hibah dari komunitas atau organisasi lain dapat terikat dan tidak terikat. Pendapatan hibah digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan BLUD yang dinyatakan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian hibah.
3. Hasil kolaborasi dengan pihak lain mungkin merupakan hasil kolaborasi BLUD.
4. DPA AP BD, berupa pendapatan berasal.
5. Penghasilan BLUD legal tambahan, seperti:
 - a. layanan giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. manfaat dari perubahan nilai rupiah relatif terhadap mata uang lainnya;
 - d. komisi, pengurangan, atau bentuk lain yang dihasilkan dari penjualan dan / atau pengadaan produk dan / atau layanan oleh BLUD;
 - e. investasi; dan F. pengembangan bisnis.

Ada peraturan untuk pengenaan tarif layanan, yang diatur sebagai berikut, sehubungan dengan pendapatan yang diterima dari kompensasi untuk penyediaan barang/jasa BLUD:

- a. kebijakan pengenaan tarif

Biaya layanan dihitung berdasarkan:

- 1) menentukan harga per unit layanan

Perhitungan ini berusaha untuk membayar semua atau sebagian biaya produksi yang terkait dengan layanan yang diberikan oleh BLUD. Metode akuntansi biaya dan hasil per investasi modal digunakan untuk menentukan harga untuk layanan ini.

Ini adalah perhitungan tingkat yang menyatakan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan VID selama periode waktu tertentu. Biaya layanan ini berlaku untuk BLUD yang mengelola dana.

b. Formulir jumlah tarif

Penyusunan tarif dalam bentuk berikut menentukan jumlah tarif:

- 1) nilai uang nominal;
- 2) persentase harga patokan, indeks harga, nilai tukar, laba kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.

c. Proses penyusunan tarif

Dalam menentukan besaran tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat dan batas waktu penetapan tarif, pimpinan memperhatikan masalah kesinambungan, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, konsep keadilan dan kesopanan, serta persaingan yang sehat. Aturan berikut mengatur bagaimana tarif layanan harus disiapkan:

- 1) Pimpinan menyarankan kepada kepala daerah tarif layanan BLUD.
- 2) tarif layanan yang diusulkan, seperti tarif layanan baru yang diusulkan atau kemungkinan penyesuaian biaya layanan yang ada.
- 3) Apakah tarif layanan yang diusulkan diterapkan ke layanan secara keseluruhan atau per unit.

Untuk menyiapkan tarif layanan BLUD, anggota tim dapat berasal dari:

SKPD bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- (a) Kegiatan BLUD;

- (b) pengelolaan keuangan daerah;
- (c) komponen pendidikan tinggi; dan
- (d) lembaga profesional.

5) Peraturan kepala daerah yang mengatur tarif pelayanan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan rakyat daerah.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, BLUD menghasilkan pendapatan selain pembayaran untuk layanan. Salah satu sumber lain ini adalah pendapatan dari kolaborasi dengan pihak ketiga. bekerja sama dengan pihak tambahan memerlukan:

1. Kolaborasi praktis

Kolaborasi operasional dilakukan tanpa memanfaatkan properti lokal dengan mengelola manajemen dan prosedur operasional bersama dengan mitra kerja sama.

2. Memanfaatkan properti lokal

Penggunaan properti regional dicapai melalui eksploitasi dan / atau optimalisasi sambil mempertahankan status kepemilikannya dan mempertahankan standar layanan publik, yang keduanya merupakan tanggung jawab BLUD.

Tidak semua dari beberapa sumber pendapatan untuk DARA dapat ditangani langsung oleh BLUD. Ditemukan bahwa, dengan pengecualian dari hibah terikat, pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA. Akun BLUE Cash digunakan untuk menerapkan pendapatan BLUD yang berasal dari hibah.

Pendapatan dari BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam SKPD RKA pada akun pendapatan daerah pada kode akun kelompok

pendapatan asli daerah pada jenis pendapatan asli daerah legal lainnya dengan pendapatan BLUD sebagai objek pendapatan.

2.1.7 Belanja BLUD

Peraturan tersebut menetapkan bahwa uang BLUD dialokasikan untuk mencakup inisiatif dukungan layanan dan layanan serta program untuk peningkatan layanan. Belanja BLUD meliputi:

a. Kegiatan ritel

Semua biaya BLUD, seperti untuk mempekerjakan staf, membeli produk dan layanan, membayar bunga, dan biaya lainnya, termasuk dalam biaya operasional.

b. Investasi Modal

Istilah "belanja modal" mengacu pada semua pengeluaran BLUD untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan BLUD dan akan bermanfaat selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Ini termasuk pengeluaran untuk tanah, mesin, bangunan, jalan, sistem irigasi, dan aset tetap lainnya.

Dengan mempertimbangkan volume operasi layanan, manajemen pengeluaran BLUD ditawarkan fleksibilitas, dengan yang berikut

1. Dengan fluktuasi pendapatan yang tetap berada di bawah kriteria RBA dan DPA yang ditetapkan dengan jelas, fleksibilitas adalah BLUD pengeluaran.
2. Pengeluaran BLUD yang didanai oleh pendapatan BLUD dari layanan, hibah, hasil kolaborasi dengan pihak ketiga, pendapatan BLUD legal lainnya, dan hibah tidak terbatas dapat fleksibel.

Persentase pengeluaran terealisasi yang mungkin melebihi anggaran di RBA dan DPA diwakili oleh ambang batas. Dapatkan persetujuan kepala daerah terlebih dahulu jika pengeluaran BLUD melebihi batas. Dalam kasus defisit anggaran, BLUD menyarankan untuk mentransfer dokumen anggaran dari APBD ke PPKD. Terkait dengan jumlah persentase ambang batas, dalam urutan berikut:

1. Jumlah ambang batas persentase menyumbang fluktuasi dalam kegiatan operasi, seperti:
 - a. kecenderungan atau tren perbedaan Anggaran BLUD selain anggaran tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun fiskal sebelumnya; dan b. kecenderungan atau tren perbedaan Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran saat ini.
2. RBA dan DPA keduanya memberikan catatan yang merinci jumlah persentase ambang batas dan memasukkannya ke dalam daftar persentase mereka.
3. Ambang batas persentase adalah permintaan yang dapat diantisipasi, dipenuhi, dikuantifikasi, logis, dan diperhitungkan.
4. Ambang batas diterapkan ketika diantisipasi bahwa pendapatan BLUD akan melebihi tujuan pendapatan yang ditetapkan dalam RBA dan DPA untuk tahun yang dianggarkan.

Ketentuan berikut berlaku berbeda untuk pengeluaran BLUD untuk pembelian barang atau jasa yang bersumber dari APBD dibandingkan untuk pembelian barang atau jasa yang bersumber dari sumber selain APBD:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembelian produk/jasa pemerintah diikuti saat melakukan pembelian barang dan/atau jasa di BLUD dari APBD.
2. Membeli produk dan / atau layanan melalui BLUD yang didanai oleh:
 - a. layanan;

b. hibah yang tidak dibatasi;

c. kolaborasi dengan orang lain; dan d. penghasilan BLUD legal lainnya,

Fleksibilitas diberikan dalam bentuk pembebasan sebagian atau seluruhnya dari persyaratan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembelian barang dan/atau jasa dari pemerintah.

Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan tambahan yang mengatur tentang pembelian barang dan / atau jasa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang dan / atau jasa dengan kualitas yang lebih tinggi, lebih murah, sederhana, cepat, dan proses pengadaan yang mudah untuk beradaptasi dengan kebutuhan untuk mendukung operasi layanan BLUD yang efisien.

3. Pedoman berikut diikuti saat membeli produk dan / atau layanan yang dibayar dengan hibah berikut:

baik

a. kebijakan pengadaan pemberi hibah atau

b. persetujuan pemberi hibah atas peraturan kepala daerah.

Akun pengeluaran daerah, yang selanjutnya dipecah menjadi 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis pengeluaran, mengintegrasikan/mengkonsolidasikan pengeluaran BLUD yang sumber uangnya berasal dari pendapatan BLUD. Jika pagu anggaran untuk jenis pengeluaran DPA yang harus diserahkan ke PPKD tidak terlampaui, BLUD dapat mengubah spesifikasi pengeluaran. RBA mencakup daftar spesifik pengeluaran.

2.1.8 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD

Sebagai metode akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, BLUD menyiapkan pelaporan dan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan untuk BLUD harus disiapkan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah, yang berarti bahwa siklus akuntansi yang digunakan BLUD dan cara data dan informasi disajikan harus sesuai (SAP). Melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217 / PMK.05/2015, PSAP berbasis akrual nomor 13 pada penyajian Laporan Keuangan Lembaga Pelayanan Publik dibentuk pada tahun 2015.

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengontrol bagaimana lembaga layanan publik menyiapkan laporan keuangan mereka sehingga mereka dapat lebih mudah dibandingkan dengan anggaran, periode lain, dan tahun-tahun lainnya.

organisasi layanan publik Laporan kinerja yang merinci pencapaian hasil atau keluaran BLUD disediakan bersama dengan pelaporan keuangan BLUD. Tujuan utama laporan keuangan BLUD adalah untuk memberikan data kepada pengguna tentang situasi keuangan BLUD, realisasi anggaran, saldo anggaran surplus, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang membantu untuk membuat dan menilai keputusan alokasi sumber daya.

- a. Laporan realisasi anggaran 1
- b. (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca,
- d. Laporan Operasional (LO),
- e. Laporan Arus Kas,
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan semuanya termasuk dalam laporan keuangan BLUD (CaLK).

Informasi tentang sumber daya dan kewajiban keuangan BLUD pada tanggal pelaporan dapat ditemukan dalam laporan keuangannya pergerakan sumber daya ekonomi saat ini. Pengguna akan membutuhkan data ini untuk

mengevaluasi kelayakan finansial BLUD dalam menjalankan aktivitasnya di masa depan. Setiap triwulan, semester, dan tahun, SKPD diberikan laporan keuangan BLUD. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan, laporan keuangan diaudit oleh auditor luar pemerintah.

2.1.9 Kemandirian

Kata " otonomi, "yang berarti sesuatu yang otonom atau kapasitas untuk bertindak sebagai orang dewasa dan berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab untuk setiap tindakan untuk memenuhi persyaratan sendiri, adalah akar dari kata" kemerdekaan."Kartono (2000). (2000).

Kemandirian, menurut Barnadib (1987), mensyaratkan "perilaku mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi kesulitan atau masalah, memiliki kepercayaan diri, dan dapat mencapai apa pun sendiri tanpa bantuan orang lain."Kartini dan Dali (2000), yang mengklaim bahwa kemerdekaan adalah dorongan untuk menangani semuanya sendiri, mendukung sudut pandang ini. Selain itu, kemandirian adalah kapasitas untuk berfungsi tanpa intervensi dari luar (Sanjaya 2008). Dalam penelitian ini, independensi didefinisikan sebagai kapasitas rumah sakit untuk mengatur, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia.

2.2 Tinjauan Empirik

Salah satu referensi dalam melakukan penelitian adalah penelitian sebelumnya atau tinjauan empiris; hasil ini sangat signifikan dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk penelitian di masa depan. Misalnya, Slamet & Supeno (2022), Ariyani, A. (2021), Son, A. A. (2018), Puspitawati & Ratnawati (2014), dan Wijayanti & Masdjojo adalah beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini (2017).

Dalam studi serupa tentang independensi BLUD, Slamet & Supeno (2022) menggunakan analisis rasio pendapatan dan tingkat independensi BLUD untuk menemukan bahwa sementara tingkat kinerja keuangan BLUD jauh dari harapan, tingkat independensinya memenuhi harapan tersebut dan memungkinkan BLUD cukup mandiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Tingkat kemandirian rumah sakit meningkat selama pandemi, dan semakin tinggi jenis rumah sakit, semakin tinggi peningkatan rasio kemandirian selama pandemi. Hal ini dikarenakan kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit, serta sumber daya manusia yang memadai sehingga mampu menangani pandemi. Ariyani, A. (2021) melakukan penelitian serupa dengan yang satu ini menggunakan analisis rasio independensi untuk mengukur tingkat independensi rumah sakit.

Son, A. A. (2020), yang melakukan penelitian serupa dan menggunakan teknik penelitian yang sama, menemukan bahwa posisi keuangan Rumah Sakit Kota Bekasi dapat digambarkan sangat independen, menunjukkan bahwa kemandirian rumah sakit sebagai BLUD telah dicapai dan dari sumber pendanaan eksternal. Temuan analisis tren menunjukkan bahwa kemandirian finansial rumah sakit akan terus meningkat.

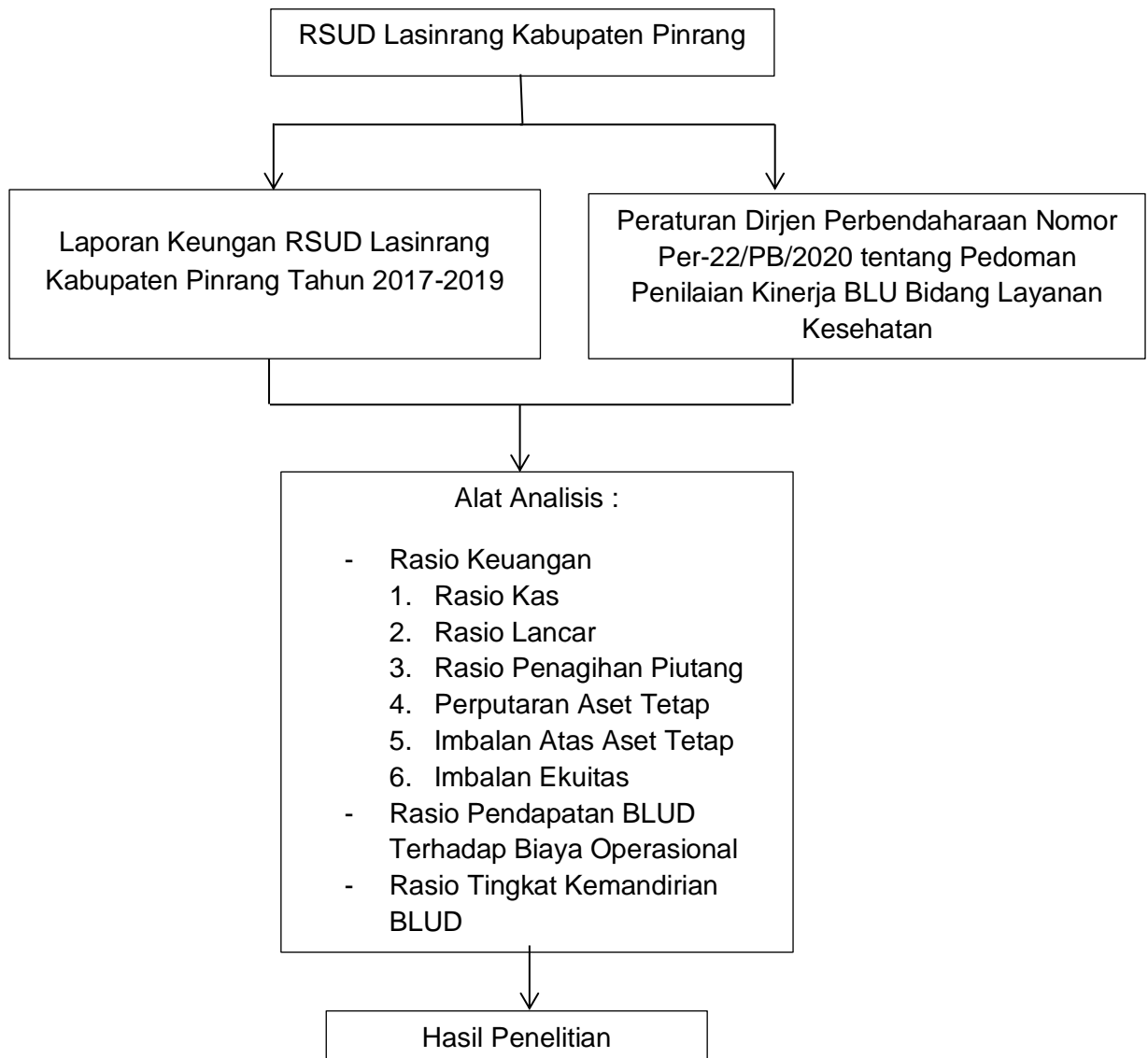
Menurut sebuah studi oleh Puspitawati dan Ratnawati (2014), tingkat kemandirian finansial layanan rawat inap primer di Blud Rs Jiwa Menur umumnya meningkat setelah analisis kegiatan, tetapi pemerintah terus mensubsidi gaji pegawai negeri sipil. Studi ini meneliti kemandirian finansial dan aktivitas layanan rawat inap utama menggunakan metode penetapan biaya berbasis aktivitas. Pencapaian target kinerja cukup tinggi dengan pendekatan per-misi.

Wijayanti & Masdjojo (2017) menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif untuk melakukan studi kinerja keuangan rumah sakit Bendan di kota Pekalongan. Karena layanan kesehatan BLUD telah jauh dari harapan, kinerja keuangannya dikategorikan sebagai medium

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan tahap-tahap penelitian yang terstruktur, ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian yang menyebabkan data-data yang diperoleh menjadi data yang akurat. Soegeng (2011:51). Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kemandirian penggunaan pendapatan BLUD di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang tahun 2017-2019. Adapun sumber data yang digunakan ialah data sekunder yakni menggunakan laporan keuangan serta berbagai dokumen terkait.

3.2 Tempat dan Waktu

Sesuai judul penelitian, maka penulis melakukan penelitian pada RSUD Lasinrang yang bertempat di Jl. Macan No.22, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada bulan November hingga Desember 2022, dengan mengambil data laporan keuangan khususnya data pendapatan BLUD RSUD Lasinrang pada tahun anggaran 2017-2019 serta berbagai sumber kepustakaan lainnya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yang menggunakan angka untuk menggambarkan suatu kondisi secara objektif dengan menggunakan studi literatur yang dapat mendukung analisis dan bantuan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data sekunder, dalam hal ini laporan keuangan, adalah sumber data yang diperlukan.